

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan entitas akuntansi yang secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah mengamanatkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik.

Penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Adapun maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan, untuk membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan juga dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dalam mengevaluasi dan menentukan strategi pelaksanaan pada periode berikutnya.

Karakteristik Laporan Keuangan yang diperlukan agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah :

a. Relevan

Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yang berciri : memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu dan lengkap.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan yang andal berkarakteristik : penyajian jujur, dapat diverifikasi (verifiability) dan netralitas.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan dengan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam periode tertentu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen, untuk mendanai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah

Pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : Pendapatan, Belanja dan Surplus/defisit.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar, aset tetap dan aset lainnya serta ekuitas. Dalam neraca semua jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit Laporan Operasional.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- s. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0024475 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target
Yang
Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Prinsip dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan
Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan
yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada OPD

Bab 5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan OPD

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan OPD**Bab 7 Penutup****Lampiran Tambahan**

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan nasional atau pertumbuhan output dalam periode tertentu serta menggambarkan adanya peningkatan kapasitas produksi atas barang dan jasa secara fisik pada periode tertentu. Menurut Herlan Firmansyah (2009), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas SDM, SDA, Investasi/modal, sistem sosial, politik dan budaya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Sektor Kelautan dan Perikanan mempunyai kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Bidang Kelautan dan Perikanan serta mengacu kinerja investasi usaha perikanan yang selaras dengan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi perkembangan wilayah yang disertai upaya peningkatan mediasi antara usaha Kelautan dan Perikanan sebagai pihak penyedia dengan dunia industri sebagai pihak pengguna.
- b. Mengintensifkan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan pada kawasan konsentrasi potensi sumber daya potensial yang mampu menggerakkan sistem ekonomi untuk menciptakan kondisi kompetitif wawasan maupun wilayah Jawa Tengah.
- c. Mensinergikan keterkaitan peran secara harmonis antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota dalam mekanisme fungsional pengelolaan Kelautan dan Perikanan.

Kinerja Produk Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah Tahun 2019 mencapai 5,41% meningkat 0,1% dibandingkan Tahun 2018. Sektor yang mengalami pertumbuhan yakni informasi dan komunikasi yang tercatat 11,62%, jasa perusahaan 10,54%, serta Makan Minum 9,14%. Dari Lapangan Usaha sektor yang paling banyak berkontribusi ke Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah adalah industri pengolahan yang mencapai 34,42%. Sedangkan kontribusi Ekspor sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah

pada periode Januari s/d Desember 2019 mencapai volume 52.113 ton dengan nilai 2,9 Trilyun.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari mekanisme Pengelolaan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Target Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 10.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 12.662.079.142,00 capaian 120,59%. Realisasi target pendapatan tersebut terdiri dari :

- Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi Sewa Laboratorium, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi Sewa Ruang, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan meliputi Tambat Labuh, Pas Masuk, Jasa Kebersihan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi Penerimaan Balai Benih dan Penjualan Produksi Es, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi Sewa Lahan, Sewa Workshop dan Sewa Rumah Dinas dengan target Rp 7.200.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 9.235.492.275,00.
- Retribusi Perizinan Tertentu meliputi pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi dengan target Rp 3.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 3.359.574.260,00
- Pendapatan Denda Retribusi terdiri dari Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 9.082.707,00 dan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp 57.929.900,00.

2.2.2. Kebijakan Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 42.604.624.000,00 terealisasi sebesar Rp 41.107.403.497,00. Adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja tidak langsung yang berupa gaji pegawai disebabkan oleh :

1. Pegawai meninggal dunia selama tahun 2019 sebanyak 3 Orang,
2. Pegawai ASN yang pensiun sebanyak 27 Orang, terdiri dari :
 - ❖ Pegawai Golongan IV sebanyak 7 Orang;
 - ❖ Golongan III sebanyak 20 Orang.

b. Belanja Langsung

Anggaran untuk Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 122.875.631.000,00 dengan perincian :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp 54.012.674.000,00 |
| b. Belanja Barang Jasa | Rp 45.829.126.000,00 |
| c. Belanja Modal | Rp 23.033.831.000,00 |

Adapun realisasinya sebesar Rp 117.180.174.827,00 atau 95,34% dengan perincian :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp 52.248.843.497,00 |
| b. Belanja Barang Jasa | Rp 42.897.901.042,00 |
| c. Belanja Modal | Rp 22.033.430.288,00 |

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 diindikasikan dengan membandingkan antara jumlah realisasi dengan anggaran belanja. Selain itu realisasi pencapaian target kinerja keuangan juga diukur keberhasilannya dengan melihat perbandingan antara realisasi dengan anggaran hasil/keluaran untuk masing-masing program/kegiatan. Berdasarkan pada tabel Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019, Dinas Kelautan telah berhasil mencapai target kinerja keuangan tahun anggaran 2019 secara efektif dan efisien.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target Yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan mencapai target kinerja keuangan secara efektif dan efisien dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Selain adanya faktor-faktor yang mendukung, juga terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan pada tahun anggaran 2019.

3.2.1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target kinerja keuangan sesuai dengan yang telah ditetapkan :

1. SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang berkualitas.
2. Adanya Sarana dan Prasarana penunjang kinerja pegawai yang memadai.
3. Disiplin kerja dan loyalitas pada pekerjaan yang tinggi.

3.2.2. Kendala dan Hambatan

Faktor-faktor yang menghambat dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Dapat Dikendalikan

- a. Kurangnya jumlah SDM utamanya Tenaga Teknis di Lapangan.
- b. Minimnya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang sesuai dengan tupoksinya.
- c. Sarana dan prasarana pendukung di UPT kurang memadai.

2. Tidak Dapat Dikendalikan (Force Majeur)

Faktor alam berpengaruh besar pada pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yakni :

- a. Adanya fenomena anomali cuaca sehingga sangat berpengaruh terhadap produksi dan kegiatan kelautan dan perikanan.
- b. Adanya sistem penetapan pajak bea masuk produk ekspor hasil perikanan Indonesia di Kawasan Eropa maupun Amerika Serikat.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTASI

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah basis akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan, meliputi :

a. Kas di Kas Daerah

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggungjawab oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) dan sisa ganti uang (GU) serta sisa tambah uang (TU) yang belum disetor ke kas daerah pertanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran. Kas Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal.

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerima merupakan kas yang menjadi tanggung jawab oleh bendahara penerima yang berasal dari pendapatan retribusi dan penerimaan lain-lain yang belum disetor ke kas daerah pertanggal neraca. Kas dibendahara penerima diakui pada saat menerima pendapatan atau menyetor ke Kas Daerah berdasarkan nilai nominal.

d. Tanah

Diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan.

e. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk

memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung sampai dengan siap untuk digunakan. Sedangkan biaya ini meliputi harga beli atau konstruksi dan biaya lainnya.

g. Pendapatan

Pendapatan disini meliputi pemanfaatan aset daerah secara optimal, yakni pemakaian kekayaan daerah, penjualan produk daerah, retribusi perijinan dan pendapatan lain yang sah.

h. Belanja

Meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur No. 89 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 12.662.079.142,00 atau 120,59% dari target Rp 10.500.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 9.966.217.269,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah	10.500.000.000	12.662.079.142	120,59	9.966.217.269
Jumlah	10.500.000.000	12.662.079.142	120,59	9.966.217.269

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 12.662.079.142,00 atau 120,59% dari target Rp 10.500.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 9.966.217.269,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Retribusi daerah	10.500.000.000	12.595.066.535	119,95	9.889.271.269
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	67.012.607	100	76.946.000
Jumlah	10.500.000.000	12.662.079.142	120,59	9.966.217.269

5.1.1.1.1. Hasil Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 12.595.066.535,00 atau 119,95% dari target Rp 10.500.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 9.889.271.269,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Usaha	7.200.000.000	9.235.492.275	128.27%	6.729.303.069
Retribusi Perizinan Tertentu	3.300.000.000	3.359.574.260	101.81%	3.159.968.200
Jumlah	10.500.000.000	12.595.066.535	119.95%	9.889.271.269

5.1.1.1.1.1. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 9.235.492.275,00 atau 128.27% dari target Rp 7.200.000.000,00dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 6.729.303.069,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Laboratorium	300.000.000	324.615.600	108,2	306.447.000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Ruang	50.000.000	51.300.000	102,6	30.550.000
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.400.000.000	1.484.634.641	106	4.278.246.069
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.450.000.000	7.374.942.034	135,32	4.278.246.069
Jumlah	7.200.000.000	9.235.492.275	128.27	6.729.303.069

5.1.1.1.1.1.1. Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 3.359.574.260,00 atau 101,81% dari target Rp 3.300.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.159.968.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Ijin Usaha Perikanan	3.300.000.000	3.359.574.260	101.81	3.159.968.200
Jumlah	3.300.000.000	3.359.574.260	101.81	3.159.968.200

5.1.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 67.012.607,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 76.946.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Denda Retribusi	-	67.012.607	-	-
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	76.946.000
Jumlah	-	67.012.607	-	76.946.000

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1.BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 95.146.744.539,00 atau 95,27% dari anggaran Rp 99.841.800.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 101.776.153.621,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	54.012.674.000	52.248.843.497	96,69	53.570.485.951
Belanja Barang & Jasa	45.829.126.000	42.897.901.042	93,60	48.205.667.670
Jumlah	99.841.800.000	95.146.744.539	95,27	101.776.153.621

5.1.2.1.1.Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 52.248.843.497,00 atau 96,69% dari anggaran Rp 54.012.674.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 53.570.485.951,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	43.824.524.000	42.202.353.497	96,3	44.302.470.951
Belanja Pegawai langsung	10.188.150.000	10.046.490.000	98.37	9.268.015.000
Jumlah	54.012.674.000	52.248.843.497	96.69%	53.570.485.951

5.1.2.1.1.1.Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 42.897.901.042,00 atau 93,60% dari anggaran Rp 45.829.126.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 48.205.667.670,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	5.999.750.000	5.771.135.314	96,19	7.400.133.921
Belanja Bahan/Material	7.599.438.000	7.487.054.831	98,52	11.446.091.820
Belanja Jasa Kantor	4.039.743.000	3.183.368.659	78,80	4.896.613.291
Belanja Premi Asuransi	1.950.000.000	1.884.602.600	96,65	97.098.614
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.267.350.000	1.124.701.502	88,74	845.669.139
Belanja Cetak dan Penggandaan	768.195.000	678.084.899	88,27	1.058.099.099
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	678.950.000	602.107.505	88,68	797.443.644
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	111.550.000	90.400.000	81,04	197.313.000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	397.500.000	383.779.000	96,55	222.950.000
Belanja Makanan dan Minuman	1.658.945.000	1.534.102.260	92,47	2.074.892.005
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	197.550.000	197.550.000	99,40	-
Belanja Pakaian Kerja	26.150.000	26.116.000	99,87	4.400.000

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Perjalanan Dinas	7.706.530.000	7.134.032.185	92,57	5.864.136.439
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	140.000.000	114.047.162	81,46	91.252.000
Belanja Pemeliharaan	4.052.050.000	3.919.397.325	96,73	3.333.181.768
Belanja Jasa Konsultasi	2.481.575.000	2.250.588.900	90,69	1.507.987.750
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	85.000.000	83.993.000	98,82	-
Belanja Hadiah Barang	58.500.000	58.500.000	100	30.386.000
Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.193.550.000	5.984.173.900	96,62	8.011.719.180
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	416.800.000	391.350.000	93,89	326.300.000
Jumlah	45.829.126.000	42.897.901.042	93,60	48.205.667.670

5.1.2.1.1. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 22.033.430.288,00 atau 95,66% dari anggaran Rp 23.033.831.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 12.966.943.691150,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Peralatan dan Mesin	8.465.510.000	8.221.875.415	97,12	3.450.170.380
Belanja Gedung dan Bangunan	7.036.619.000	6.875.927.873	97,72	3.259.459.984
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	7.521.702.000	6.927.297.000	92,10	5.995.841.527
Belanja Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Renovasi)	10.000.000	8.330.000	83,30	261.471.800
Jumlah	23.033.831.000	22.033.430.288	95,66	12.966.943.691

5.1.2.1.1.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 8.221.875.415,00 atau 97,12% dari anggaran Rp 8.465.510.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.450.170.380,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Bantu	1.339.470.000	1.333.344.900	99,54	448.764.080
Belanja Alat Angkutan Darat Bermotor	1.950.000.000	1.763.800.000	90,45	-
Belanja Alat-alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	20.435.000
Belanja Alat Angkut Apung Bermotor	2.675.550.000	2.659.092.000	99,38	-
Belanja Alat-alat Bengkel Bermesin	-	-	-	184.960.000
Belanja Alat Ukur	45.000.000	34.650.000	77	-

Belanja Alat Pengolahan	-	-	-	324.353.500
Belanja Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan	-	-	-	61.395.000
Belanja Alat Kantor	200.790.000	195.623.000	97,43	435.208.000
Belanja Alat Rumah Tangga	844.000.000	837.274.000	99,20	620.444.000
Belanja Komputer	353.000.000	348.919.515	98,84	541.468.000
Belanja Alat-alat Studio	769.500.000	765.890.000	99,53	765.686.800
	34.000.000	34.000.000	100	7.790.000
Belanja Alat Komunikasi				
Belanja Unit-unit Laboratorium	127.100.000	123.432.000	97,11	80.141.000
Belanja Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	127.100.000	125.850.000	99,02	19.525.000
Jumlah	8.465.510.000	8.221.875.415	97,12	3.450.170.380

5.1.2.1.1.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 6.875.927.873,00 atau 97,72% dari anggaran Rp 7.036.619.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.259.459.984,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung Tempat Kerja	6.447.822.000	6.292.224.673	97,59	3.259.459.984
Belanja Gedung Tempat Tinggal	588.797.000	583.703.200	99,13	-
Jumlah	7.036.619.000	6.875.927.873	97,72	3.259.459.984

5.1.2.1.1.1.1 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 6.927.297.000,00 atau 92,10% dari anggaran Rp 7.521.702.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.995.841.527,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan	788.600.000	777.161.000	98,55	220.974.000
Belanja Bangunan Air Pasang Surut	-	-	-	465.201.991
Belanja Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-	-	35.969.500
Belanja Bangunan Air Kotor	-	-	-	1.350.207.000
Belanja Bangunan Air	6.605.577.000	6.023.855.000	91,19	3.302.135.049
Belanja Instalansi Air Minum/ Air Bersih	50.500.000	49.500.000	98.02	499.011.000
Belanja Instalansi Air Kotor	-	-	-	21.500.000

Belanja Instalansi Pengolahan Sampah	-	-	-	67.240.000
Belanja Instalansi Pembangkit Listrik	77.025.000	76.781.000	99,68	-
Belanja Jaringan Listrik	-	-	-	33.602.987
Jumlah	7.521.702.000	6.927.297.000	92,10	5.995.841.527

5.1.2.1.1.1.1.1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 8.330.000,00 atau 83,30% dari anggaran Rp 10.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 261.471.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Aset Tetap Renovasi	10.000.000	8.330.000	83,30	261.471.800
Jumlah	10.000.000	8.330.000	83,30	261.471.800

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp 104.518.095.685,00) sedangkan Tahun 2018 sebesar (Rp 104.776.880.043,00)

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp 293.484.352.436,55 naik sebesar Rp 21.070.861.023,1 atau 7,73% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 272.413.491.413,45

5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp 900.924.060,42 turun sebesar Rp 543.742.883,13 atau 37,64% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.444.666.943,55

5.2.1.1.1 Kas

Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. - naik/turun sebesar - atau - dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. - dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

5.2.1.1.1.1 Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang pendapatan lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.105.302.718,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.105.302.718,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
Piutang Tempat Pelelangan Ikan	4.105.302.718	4.105.302.718
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(4.105.302.718)	(4.105.302.718)
Piutang Pendapatan Lainnya Netto	-	-

Penjelasan Mutasi Piutang Lainnya

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Piutang TPI	4.105.302.718	-	-	4.105.302.718
	Jumlah	4.105.302.718			4.105.302.718

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 sebesar (Rp 4.105.302.718,00) tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar (Rp 4.105.302.718,00) dengan rincian sebagai berikut :

	2019		2018	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
lancar	-	-	-	-
menunggak 1-2 tahun	-	-	-	-
menunggak 2-3 tahun	-	-	-	-
menunggak 3-5 tahun	-	-	-	-
menunggak lebih dari 5 tahun	4.105.302.718	(4.105.302.718)	4.105.302.718	(4.105.302.718)
Jumlah	4.105.302.718	(4.105.302.718)	4.105.302.718	(4.105.302.718)

5.2.1.1.1.1 Belanja Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp 132.921.135,62 naik sebesar Rp 69.128.723,45 atau 108,37% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 63.792.411,55 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Asuransi BMD	132.921.135,62	63.792.411,55
Jumlah	132.921.135,62	63.792.411,55

5.2.1.1.1.1.1 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 768.002.924,80 mengalami penurunan sebesar Rp 612.871.607,2 atau 44,38% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.380.874.532,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Persediaan Bahan	701.980.007	1.221.531.682
Persediaan Habis Pakai	11.406.917,80	171.000

Persediaan Obat-Obatan	7.606.000	99.312.850
Persediaan Pakan	47.010.000	59.859.000
Jumlah	768.002.924,80	1.380.874.532

5.2.1.1. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp 288.744.837.463,82 naik sebesar Rp 20.839.410.435,00 atau 7,78% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 267.905.427.028,82 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Tanah	123.748.824.110	114.984.794.150
Peralatan dan mesin	47.147.415.574	38.433.064.109
Gedung dan Bangunan	80.632.876.472	73.533.086.599
Jalan, Irigasi dan Jaringan	106.762.240.451	99.919.134.451
Aset Tetap Lainnya	512.347.698	712.831.698
Konstruksi dlm Pengerjaan	326.801.000	-
Akumulasi Penyusutan	(70.385.667.841,18)	(59.777.733.978,18)
Jumlah	288.744.837.463,82	267.905.427.028,82

5.2.1.1.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp 123.748.824.110,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.764.029.960,00 atau 7,62% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 114.984.794.150,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Tanah	123.748.824.110	8.764.029.960	-	114.984.794.150
Jumlah	123.748.824.110	8.764.029.960	-	114.984.794.150

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 114.984.794.150
Penambahan	
Belanja Modal	Rp -
Belanja Barang/Jasa	Rp 603.050.000
Hibah	Rp 8.160.979.960
Mutasi Masuk	Rp 553.550.000
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp -
Koreksi	Rp -
Jumlah	Rp 9.317.579.960
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp -
Mutasi Keluar	Rp 553.550.000
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp -
Koreksi	Rp -
Jumlah	Rp 553.550.000
Grand Total	Rp 123.748.824.110

5.2.1.1.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp 47.147.415.574,00 naik sebesar Rp 8.714.351.465,00 atau 22,67% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 38.433.064.109,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Alat Besar	3.802.402.090	956.988.400		2.485.413.690
Alat Angkut	18.679.981.783	4.867.292.550		13.812.689.233
Alat Bengkel dan Ukur	1.113.103.295	30.965.000		1.082.138.295
Alat Pertanian dan Peternakan	1.221.068.500	29.710.000		1.191.358.500
Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.579.489.622	1.658.279.500		6.921.210.122
Alat Studio dan Komunikasi	1.703.749.550	141.380.000		1.562.369.550
Alat Laboratorium	8.361.764.735	110.453.000		8.251.311.735
Alat Komputer	3.485.371.999	358.799.015		3.126.572.984
Alat Olahraga	200.484.000	200.484.000		-
Jumlah	47.147.415.574	8.714.351.465		38.433.064.109

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	38.433.064.109
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	8.221.875.415
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	1.539.936.750
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	1.002.448.500
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	489.723.300
Jumlah	Rp	11.253.983.965
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	8.747.000
Mutasi Keluar	Rp	1.539.936.750
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	772.264.500
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	218.684.250
Grand Total	Rp	2.539.632.500

5.2.1.1.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 80.632.876.472,00 naik sebesar Rp 7.099.789.873,00 atau 9,65% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 73.533.086.599,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Gedung	76.912.204.661	6.149.658.377		70.762.546.284
Monumen		-		-
Menara	675.893.315			675.893.315
Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.044.778.496	950.131.496		2.094.647.000
Jumlah	80.632.876.472	7.099.789.873		73.533.086.599

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal **Rp 73.533.086.599**

Penambahan

Belanja Modal	Rp 6.875.927.873
Belanja Barang/Jasa	Rp 298.870.000
Hibah	Rp -
Mutasi Masuk	Rp 1.542.146.087
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 659.591.496
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp 233.332.000
Koreksi	Rp 1.969.832.000
Jumlah	Rp 11.579.699.456

Berkurang

Ekstrakontable	Rp -
Mutasi Keluar	Rp 1.542.146.087
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 680.961.496

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	2.256.802.000
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	4.479.909.583
Grand Total	Rp	80.632.876.472

5.2.1.1.4. Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 106.762.240.451,00 naik sebesar Rp 6.843.106.000,00 atau 6,85% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 99.919.134.451,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Jalan dan Jembatan	3.928.772.500	919.521.000		3.009.251.500
Bangunan Air/Irigasi	100.511.983.964	5.874.085.000		94.637.898.964
Instalansi	1.859.951.000	49.500.000		1.810.451.000
Jaringan	461.532.987			461.532.987
Jumlah	106.762.240.451	6.843.106.000		99.919.134.451

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jembatan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	99.919.134.451
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	6.927.297.000
Belanja Barang/Jasa	Rp	142.360.000
Hibah	Rp	-

Mutasi Masuk	Rp	1.496.101.512
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	8.565.758.512

Berkurang

Ekstrakontable	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	1.496.101.512
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	226.551.000
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	1.722.652.512

Grand Total **Rp 106.762.240.451**

5.2.1.1.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 512.347.698,00 turun sebesar Rp 200.484.000,00 atau 28,13% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 712.831.698,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Bahan Perpustakaan	512.347.698			512.347.698
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan				200.484.000
Jumlah	512.347.698		200.484.000	712.831.698

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	712.831.698
Penambahan		
Reklasifikasi Masuk dari aset tetap dan sesama aset lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	712.831.698

Berkurang		
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	Rp	200.484.000
Reklasifikasi keluar pemanfaatan	Rp	-
Penjualan	Rp	-
Lain-lain	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	200.484.000
Grand Total	Rp	512.347.698

5.2.1.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 326.801.000,00 naik sebesar Rp 226.551.000,00 atau 225% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 100.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Konstruksi dalam pengerjaan	326.801.000	226.551.000		100.250.000
Jumlah	326.801.000	226.551.000		100.250.000

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	100.250.000
Penambahan		
Reklasifikasi Masuk dari aset tetap	Rp	226.551.000
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	226.551.000
Berkurang		
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar pemanfaatan	Rp	-
Penjualan	Rp	-
Lain-lain	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Grand Total	Rp	326.801.000

5.2.1.2. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp (70.385.667.841,18) turun sebesar Rp (10.607.933.863) atau 17,75% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp (59.777.733.978,18) dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(30.023.807.820,53)	(24.513.189.190,92)
Akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(21.219.842.067,03)	(19.570.352.457,86)
Akm. Penyusutan Jalan, Jembatan, dan Bangunan	(19.142.017.953,62)	(15.694.192.329,40)
Jumlah	(70.385.667.841,18)	(59.777.733.978,18)

5.2.1.2.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.081.344.220,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan (tetap) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.081.344.220,00

5.2.1.2.2. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.081.344.220,00 tidak mengalami kenaikan/ penurunan sebesar dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.081.344.220,00

5.2.1.2.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.838.590.912,31 mengalami kenaikan sebesar Rp. 775.193.471,23 atau 25,30% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.063.397.441,08 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Tagihan Jangka Panjang	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	446.923.275	550.670.850
Aset Tak Berwujud	-	-
Aset Lain-lain	3.391.667.637,31	2.512.726.591,08
Jumlah	3.838.590.912,31	3.063.397.441,08

5.2.2. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 188.966.256.751,55 naik sebesar Rp 21.327.765.510,1 atau 12,72% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 167.638.491.241,45

5.3.PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp 20.823.059.102,00 naik sebesar Rp 10.471.076.973,00 atau 101,15% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 10.351.982.129,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Pendapatan Asli Daerah	12.662.079.142	9.889.271.269
Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	8.160.979.960	462.710.860
Jumlah	20.823.059.102	10.351.982.129

5.3.1.1.Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp 12.662.079.142,00 naik sebesar Rp 2.772.807.873,00 atau 28,03% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 9.889.271.269,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	12.595.066.535	9.889.271.269
Lain PAD yg Sah - LO	67.012.607	-
Jumlah	12.662.079.142	9.889.271.269

Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp 12.595.066.535,00 naik sebesar Rp 2.705.795.266,00 atau 27,36% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 9.889.271.269,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
Retribusi Pemakaian	7.750.857.634	4.615.243.069

	2019	2018
Kekayaan Daerah - LO		
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	1.484.634.641	2.114.060.000
Retribusi Izin Perikanan - LO	3.359.574.260	3.159.968.200
Jumlah	12.595.066.535	9.889.271.269

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-Lain PAD yang sah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp 67.012.607,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Penerimaan Lain-lain SKPD	67.012.607	-
Jumlah	67.012.607	-

5.3.1.2 Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.160.979.960,00 naik sebesar Rp 7.698.269.100,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 462.710.860,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
Pendapatan Hibah-LO	8.160.979.960	462.710.860
Jumlah	8.160.979.960	462.710.860

5.3.2. BEBAN

Beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp 105.353.591.243,90 turun sebesar Rp 4.775.474.712,55 atau 4,34% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 110.129.065.956,45

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2019 sebesar Rp 106.402.371.243,90 turun sebesar Rp 3.726.694.713 atau 3,38% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 110.129.065.956,45.

	2019	2018
Beban Pegawai	52.248.843.497,00	53.570.485.951,00
Beban Persediaan	20.220.210.652,20	19.316.631.653
Beban Jasa	11.043.302.260,93	11.206.156.991,45
Beban Pemeliharaan	3.999.818.827	3.002.453.207
Beban Perjalanan Dinas	7.134.032.185	5.864.136.439
Beban Penyusutan Amortisasi	10.698.636.821,77	9.155.682.513
Beban Lain-Lain	8.747.000	1.800.022
Jumlah	105.353.591.243,90	110.129.065.956,45

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp 293.484.352.436,55 naik sebesar Rp 21.070.861.023,1 atau 7.73% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 272.413.491.413,45

	2019	2018
Ekuitas Awal	272.413.491.413,45	264.273.396.892,52
Surplus/Defisit-LO	(84.865.513.701,90)	(100.368.788.055,05)
RK-PPKD	104.518.095.685	104.775.000.172
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	1.418.279.040	3.733.882.403,98

	2019	2018
Ekuitas Akhir	293.484.352.436,55	272.413.491.413,45

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh struktur/susunan organisasi adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, sebagaimana tersebut di atas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan :

1. Subbagian Program.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program; menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Keuangan.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan; menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan

pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, kepelabuhanan dan kenelayanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap;
- ii. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan; dan
- iii. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:

1. Seksi Pengendalian Penangkapan, Kapal dan Alat Tangkap.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, menyiapkan bahan pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perikanan ukuran 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton; menyiapkan bahan penerbitan buku kapal perikanan untuk kapal perikanan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton, pendaftaran kapal perikanan kurang dari 5 (lima) gross ton; Menyiapkan bahan pengelolaan Sumber Daya Ikan baik di perairan laut dan perairan umum daratan (PUD); menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Kepelabuhanan dan Kenelayanan.

Bertugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan menyiapkan bahan pengembangan pelabuhan perikanan, menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi pelabuhan perikanan; menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan; menyiapkan bahan penyusunan tata operasional pelabuhan perikanan; pengendalian pengembangan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran; menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kepelabuhan perikanan; menyiapkan bahan pemberdayaan nelayan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap; menyiapkan bahan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; menyiapkan bahan pemberian rekomendasi sertifikasi cara Perikanan Tangkap; menyiapkan bahan perjanjian kerjasama nelayan andon dengan provinsi lain; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan Ruang Laut.

Bertugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut; menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi rencana strategis; menyiapkan bahan penetapan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bertugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pengelolaan data statistik dan informasi pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan SDKP.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan membawahkan:

1) Seksi Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan pembinaan di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan kerjasama pencegahan konflik lintas kabupaten dan lintas provinsi di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan penggalangan, kerja sama dan koordinasi peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan penyidikan, penanganan barang bukti, ketenagaan PPNS perikanan; menyiapkan kerjasama penegakan hukum dan penanganan tindak pidana perikanan dan kelautan; menyiapkan bahan sistim pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, usaha garam, penambangan pasir, BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam, bangunan laut, pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, jenis ikan yang dilindungi, Perikanan Tangkap yang merusak (destructive fishing), kapal perikanan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, distribusi serta pelayanan sistim pemantauan kapal perikanan; menyiapkan bahan pengelolaan data statistik dan informasi bidang pengawaan sumber daya kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan komoditas, logistik, bina mutu dan diversifikasi produk.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik, bina mutu dan diversifikasi produk; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas membawahkan:

1. Seksi Pengembangan Komoditas.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, sarana dan prasarana di bidang pengembangan komoditas; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis, sarana dan prasarana di bidang pengembangan komoditas; menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyebarluasan teknologi pengembangan komoditas; menyiapkan bahan pemberdayaan pembudidaya ikan; menyiapkan bahan pembinaan permodalan dan investasi kelompok pembudidaya ikan yang usahanya di lintas kabupaten/ kota dalam satu Daerah; menyiapkan bahan penerapan standar mutu perbenihan dan budidaya ikan; menyiapkan bahan rekomendasi sertifikasi dan konsistensi penerapan cara pembenihan dan cara budidaya ikan yang baik; menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan komoditas perikanan yang usahanya di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah; menyiapkan bahan pembinaan sertifikasi dan konsistensi penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik; menyiapkan bahan pengembangan induk unggul dan gerakan pakan ikan mandiri; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik Perikanan Budidaya; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;

menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; menyiapkan bahan pengembangan teknologi pengolahan; menyiapkan bahan pembinaan sistem jaminan mutu dan keamanan produk; menyiapkan bahan diversifikasi produk olahan; menyiapkan bahan pengembangan produk non konsumsi; menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah produk hasil kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan pengembangan akses pasar produk kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan peningkatan konsumsi ikan di tingkat Daerah; menyiapkan bahan rekomendasi distribusi hasil usaha kelautan dan perikanan lintas provinsi; menyiapkan bahan promosi produk hasil perikanan; menyiapkan bahan pemenuhan bahan baku pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan verifikasi dan pemberian rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk hasil kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

G. Cabang Dinas Kelautan Kelas A

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Kelautan Kelas A mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Cabang Dinas Kelautan Kelas A melaksanakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- 3) evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- 4) pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas Kelautan Kelas A terdiri atas :

- a. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A;
- b. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A; dan
- c. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A.

Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan Kelas A sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang Dinas.

Bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas sebagaimana tersebut di atas.

Kepala Cabang Dinas melaksanakan kewenangan dalam hal :

1. kewenangan pengawasan, meliputi :
 - a. operasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan
 - b. penetapan tindak lanjut penanganan pelanggaran.
2. kewenangan konservasi, rehabilitasi dan perijinan, meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan konservasi, rehabilitasi;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis;
 - c. penyiapan rekomendasi teknis.

3. kewenangan lainnya, meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.

b. Sub bagian Tata Usaha.

Bertugas menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan; menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan; menyiapkan pengelolaan keuangan; menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah; menyiapkan kerja sama dan kehumasan; menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

c. Seksi Pengawasan;

Bertugas menyiapkan strategi, sarana prasarana, jadwal, wilayah dan jangkauan dan perawatan armada operasi pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan; menyiapkan pelaksanaan operasi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, usaha garam, penambangan pasir, BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam, bangunan laut, pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, jenis ikan yang dilindungi, penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing), kapal perikanan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, distribusi serta pelayanan sistim pemantauan kapal perikanan; menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi serta pelaporan pengawasan SDKP; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin

budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan evaluasi dan pelaporan sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

e. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

H. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A

yang terdiri atas:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari;
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo;
- e. Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung; dan
- f. Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di atas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dibidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha dengan melaksanakan fungsi:

1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
3. evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
4. pengelolaan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas:

- a. Kepala Pelabuhan.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A.

- b. Subbagian Tata Usaha.

Bertugas menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan; menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan; menyiapkan pengelolaan keuangan; menyiapkan pengelolaan kepegawaian; menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah ; menyiapkan kerja sama dan kehumasan; menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; menyiapkan

koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;

Bertugas menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; menyiapkan inspeksi pembongkaran ikan; menyiapkan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik; menyiapkan penerbitan surat persetujuan berlayar dan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; menyiapkan pemeriksaan *log book* (data tangkapan ikan); menyiapkan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; menyiapkan rekomendasi bahan bakar bersubsidi; menyiapkan pelayanan cek fisik kapal dan alat penangkap ikan; menyiapkan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

Bertugas menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional dibidang tata kelola dan pelayanan usaha; menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang tata kelola dan pelayanan usaha; menyiapkan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana; menyiapkan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan pelayanan usaha; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan yang bersangkutan.

f. Unit Penunjang

Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Sentra Pendaratan Ikan yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

2. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B

terdiri atas:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong;
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang;
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan
- e. Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan.

Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai dengan melaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
3. evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
4. pengelolaan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B terdiri atas:

- a. Kepala Pelabuhan.
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha. Tugas tersebut meliputi:
 1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;

3. menyiapkan inspeksi pembongkaran ikan;
 4. menyiapkan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
 5. menyiapkan penerbitan surat persetujuan berlayar dan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. menyiapkan pemeriksaan log book (data tangkapan ikan);
 7. menyiapkan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
 8. menyiapkan rekomendasi bahan bakar bersubsidi;
 9. menyiapkan pelayanan cek fisik kapal dan alat penangkap ikan;
 10. menyiapkan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 11. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha; dan
 12. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Subbagian Tata Usaha.
- mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:
1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
 2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 5. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
 7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Balai ; dan
 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala

Pelabuhan yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

3. Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A.

Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Produksi dan Penerapan Teknologi serta Pelayanan Usaha dan Jasa dengan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A terdiri atas:

- a. Kepala Balai.
Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A
- b. Subbagian Tata Usaha.
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:
 1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
 2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 5. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;

6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ;
7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Balai ; dan
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi;

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi Dan Penerapan Teknologi. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi;
3. menyiapkan pelaksanaan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi kepada pembudidaya air payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;
4. menyiapkan pembinaan dan temu teknis produksi kepada pembudidaya air payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;
5. menyiapkan produksi calon induk dan benih ikan air payau dan laut;
6. menyiapkan pemuliaan ikan budidaya air payau dan laut;
7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang produksi dan penerapan teknologi; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Seksi Pelayanan Usaha

dan Jasa.

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha dan jasa. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan usaha dan jasa;

2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan usaha dan jasa;
 3. menyiapkan penyebarluasan informasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
 4. menyiapkan pelayanan jasa konsultasi teknis kepada pembudidaya ikan payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tanggadan masyarakat;
 5. menyiapkan pelayanan usaha penjualan induk, caloninduk, benih dan produksi budidaya ikan air payau dan laut;
 6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha dan jasa; dan
 7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- f. Unit Penunjang
- Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Loka Budidaya Ikan Air Payau dan Laut yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

4. Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A.

Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perairan dengan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A, terdiri atas :

a. Kepala Balai.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A.

b. Subbagian Tata Usaha.

Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:

- 1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- 2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- 3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- 4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- 5. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ;
- 7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- 8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- 9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan.

Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan. Tugas tersebut meliputi :

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan;
 3. menyiapkan penyebarluasan informasi teknologi mengatasi hama dan penyakit;
 4. memonitoring dan menganalisa residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan serta penggunaan pakan ikan;
 5. mengawasi peredaran pestisida, bahan kimia maupun obat-obatan;
 6. monitoring, survailance dan menganalisa resiko akibat hama penyakit ikan;
 7. mengawasi lalu lintas media pembawa hama penyakit ikan;
 8. menganalisa dan mengevaluasi kerugian akibat hama penyakit ikan;
 9. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan; dan
 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan. Tugas tersebut meliputi :
1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 3. menyusun standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan;
 4. melaksanakan pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan;
 5. menyiapkan pelaksanaan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi kesehatan ikan dan lingkungan;
 6. mengembangkan induk dan benih yang tahan penyakit (uji dan pengembangan);

7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- f. Unit Penunjang
- Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

5. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A.

Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di

bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan dengan melaksanakan fungsi:

1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
3. evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
4. pengelolaan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A, terdiri atas:

- a. Kepala Balai

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A.

b. Subbagian Tata Usaha

Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tersebut meliputi :

1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
5. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- dan
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu hasil perikanan. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
3. menyiapkan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk pengolahan dan hasil perikanan (mikrobiologi, organoleptik dan kimia);
4. menyiapkan pengembangan kemampuan pengujian sesuai tuntutan pasar;
5. menyiapkan sistem manajemen mutu laboratorium;
6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu hasil perikanan; dan

7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Seksi Penerapan Mutu Hasil

Perikanan

Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan mutu hasil perikanan. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
3. menyiapkan inspeksi penerapan cara pengolahan yang baik dan prosedur operasional standar sanitasi;
4. menyiapkan monitoring produk hasil perikanan pada unit pengolahan ikan dan suplier (air, es, kesegaran bahan baku, dan residu bahan kimia berbahaya);
5. menyiapkan sistem manajemen mutu produk hasil perikanan
6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan mutu hasil perikanan; dan
7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

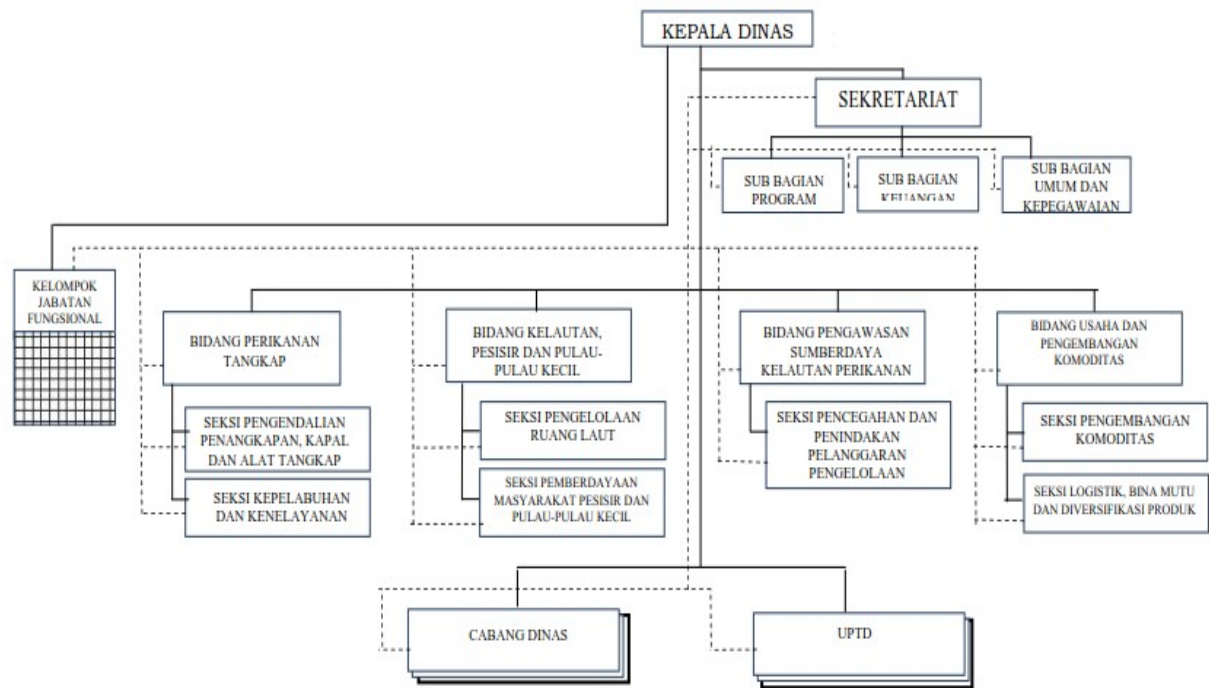
e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

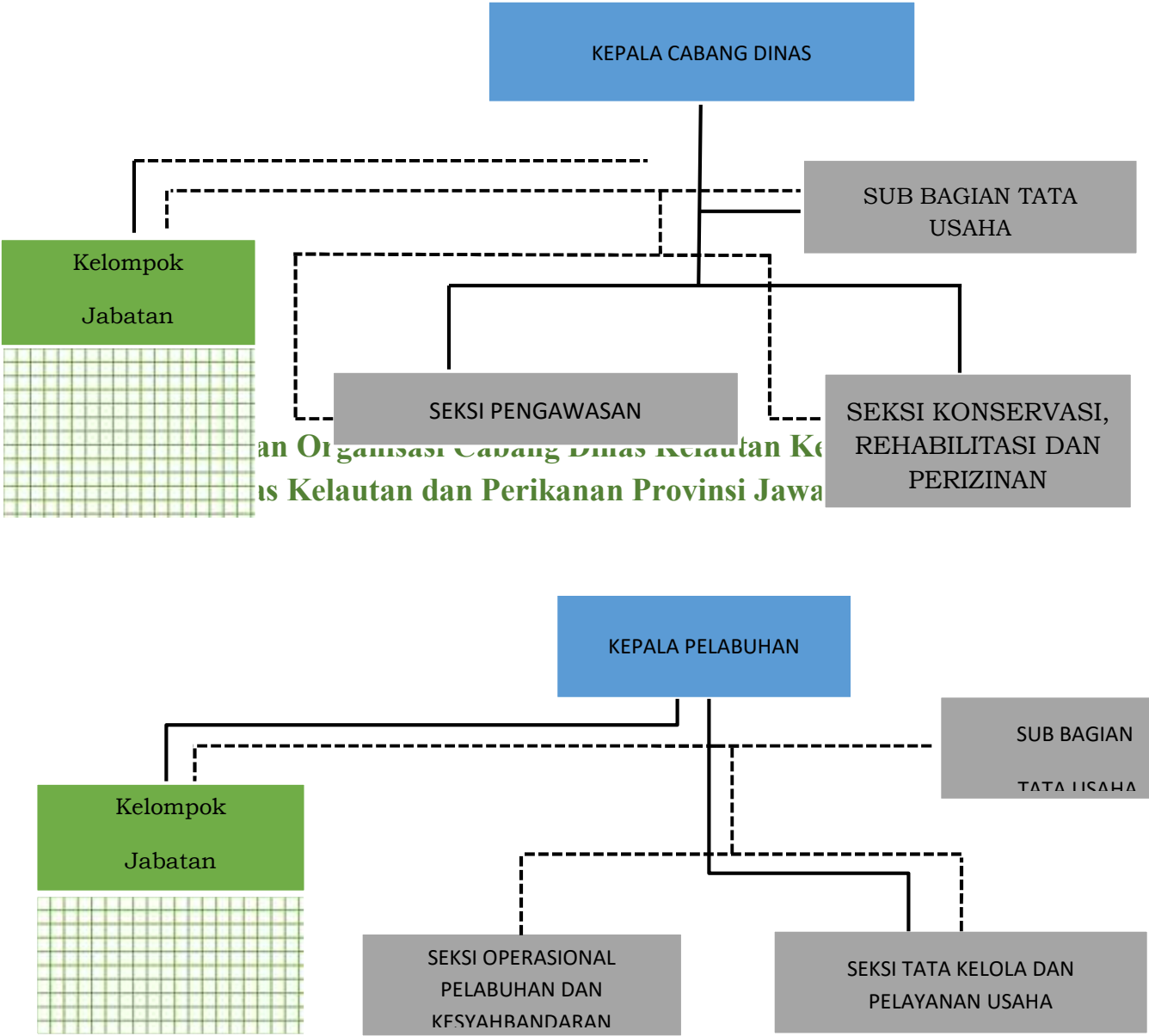
f. Unit Penunjang

merupakan unit organisasi non struktural berupa Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

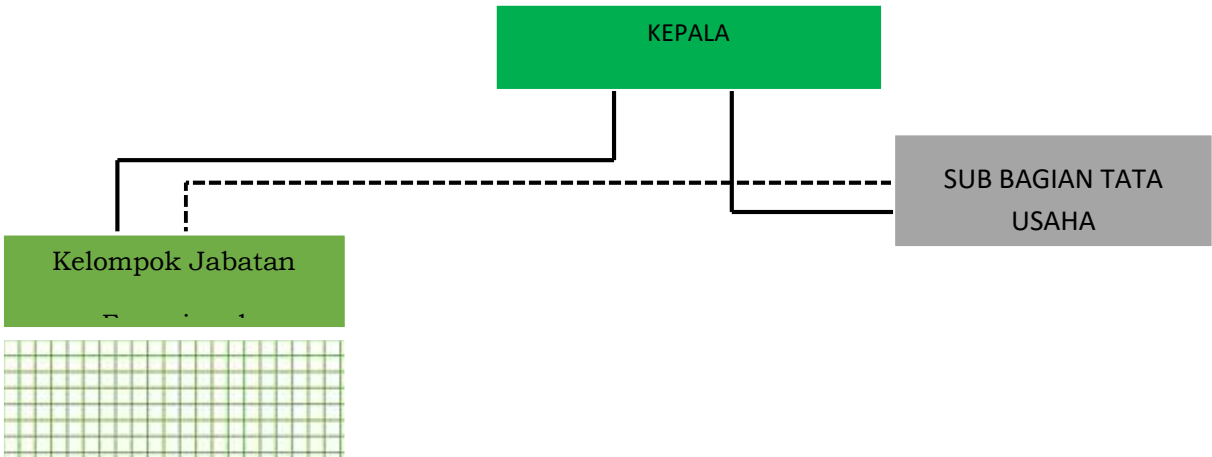
Bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.



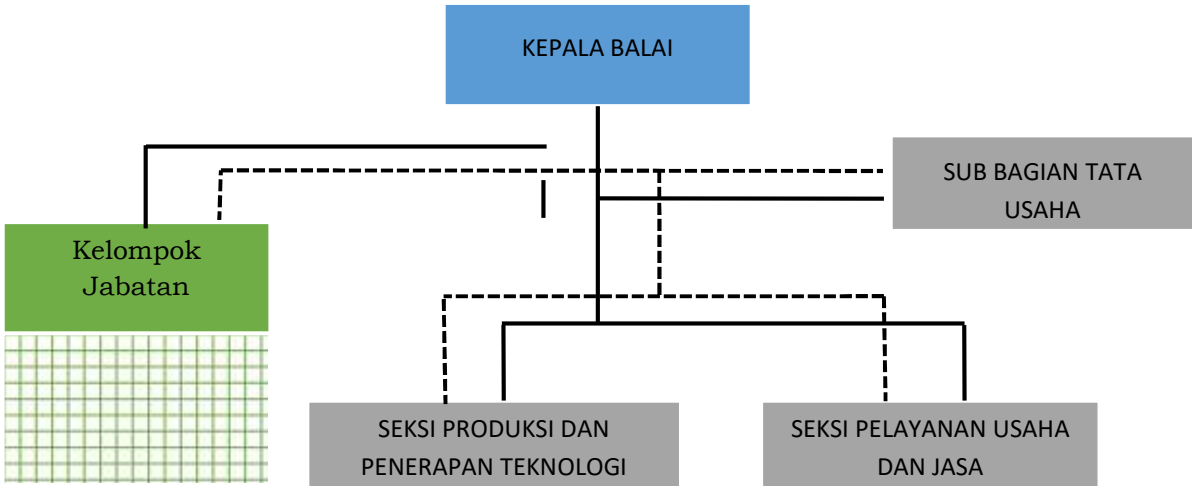
Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



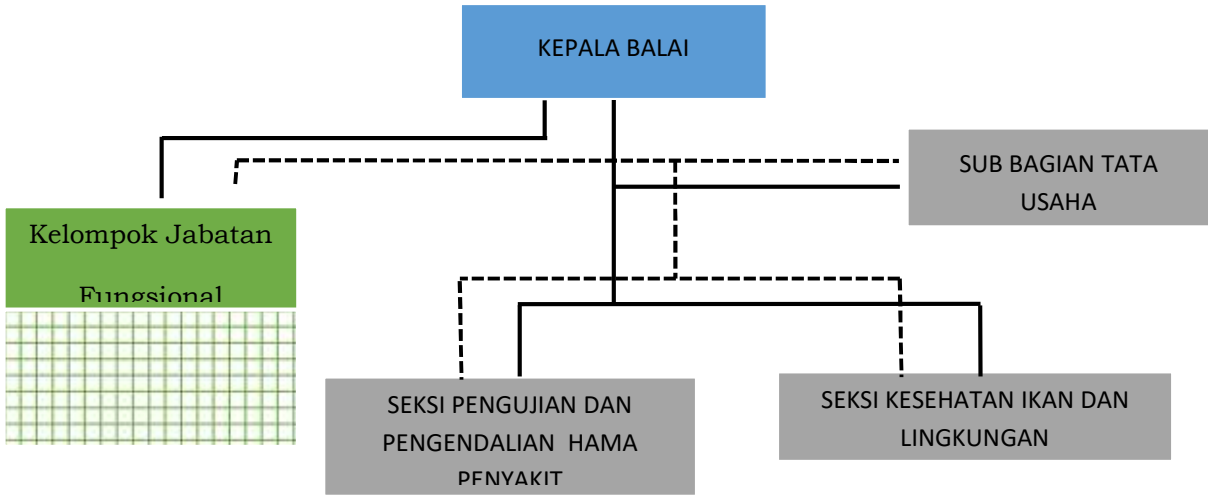
**Gambar 2.3. Bagan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah**



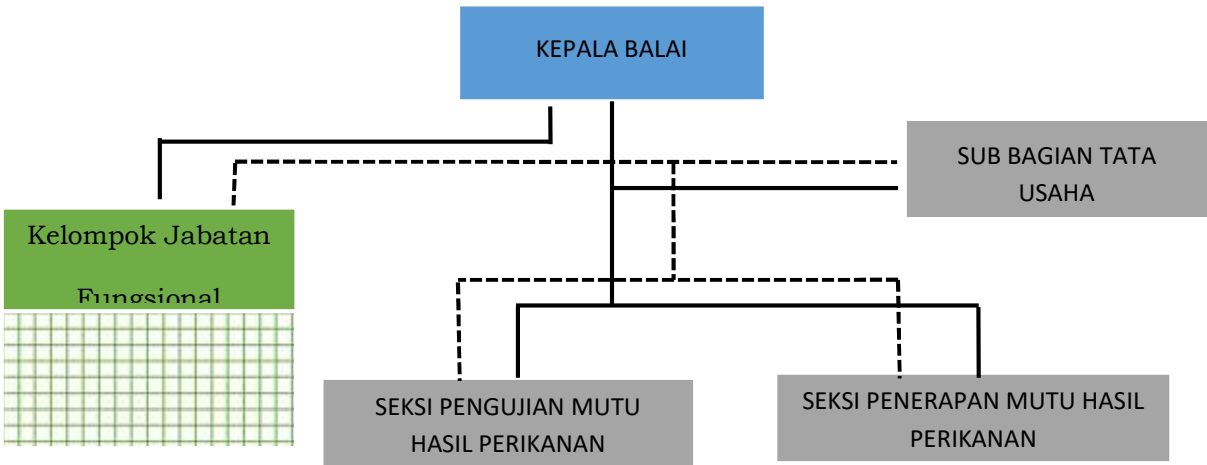
**Gambar 2.4. Bagan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah**



Gambar 2.5. Bagan Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.6. Bagan Organisasi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.7. Bagan Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

6.2. SUMBERDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

6.2.1. Jumlah Pegawai

Pada tahun 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah pegawai sebanyak 264 orang. Sejumlah pegawai tersebut tersebar di seluruh bidang dan UPT dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan golongannya jumlah pegawai Golongan I berjumlah 12 orang, Golongan II sebanyak 49 orang, Golongan III sebanyak 179 orang dan Golongan IV sebanyak 24 orang.

6.2.2. Aset/Modal

Sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara bertahap terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hingga Januari 2019, secara umum prasarana kerja berupa gedung perkantoran yang sudah milik sendiri antara lain: balai budidaya, laboratorium, kapal inspeksi perikanan, mobil laboratorium keliling dan mobil Gemarikan. Berikut ini merupakan Tabel 2.2. mengenai aset/modal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan sarana dan prasarana penunjang kinerja.

Tabel 2.2. Aset/Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2019

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
1	Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang-50132 Telp. (024) 3546469, 3546607 Fax. (024) 3551289	Luas Tanah: 5.793,96 m ² Luas Bangunan: 1.919,95 m ²
2	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Desa Mujungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal	Luas tanah: 1.790 m ² Luas bangunan:

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
			200 m ²
3	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	Jl. Panglima Sudirman No. 12 A Pati	Luas tanah: 1.997 m ² Luas bangunan: 250 m ²
4	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Jl. P. Diponegoro No.1 Magelang	Luas tanah: 54.000 m ² Luas bangunan: 200 m ²
5	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Tegalsari Kota Tegal	Jl. Blanak No.10C Kota Tegal Telp. (0283) 358787	Luas Tanah: 162.299 m ² Luas Bangunan: 4.802 m ²
6	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Klidang Lor Kab. Batang	Jl Yos Sudarso Utara, Boom Batang Telp. (0285) 391283	Luas Tanah: 88.559 m ² Luas Bangunan: 6.704 m ²
7	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Morodemak Kab. Demak	Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kec. Bonang, Kab. Demak, Telp. (0291) 3406224	Luas Tanah: 3.900 m ² Luas Bangunan: 770 m ²
8	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Bajomulyo Kab. Pati	Jl. Panglima Sudirman No.12A Desa Bajomulyo Kec. Juwana Kab. Pati Telp.(0295) 381689	Luas Tanah: - Luas Bangunan: 2.200 m ² (TPI Bajomulyo 1)
9	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Tasikagung Kab. Rembang	Jl Dorang No.1 Kec.Rembang Kab.Rembang Telp. (0295) 691094	Luas Tanah: 8.200 m ² Luas Bangunan: 6.099 m ²
10	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Lohgending Kab. Kebumen	Desa Logending Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Luas Tanah: 18.850 m ² Luas Bangunan: 1.743 m ²
11	Sentra Pendaratan Ikan Pasir Kab. Kebumen	Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Luas Tanah: 132.681 m ² Luas Bangunan: 1.743 m ²

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
12	Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat Kab.Cilacap	Jl. Veteran No. 2 Cilacap	Luas Tanah: 14.012 m ² Luas Bangunan: 650 m ²
13	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Asemboyong Kab. Pemalang	Desa Asemboyong Kec. Taman Kab. Pemalang Telp. (0248) 3278421	Luas Tanah: 5.780 m ² Luas Bangunan: 204 m ²
14	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Wonokerto Kab. Pekalongan	Desa Tratebang Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	Luas Tanah: 13.935 m ² Luas Bangunan: 3.243 m ²
15	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Tawang Kab. Kendal	Desa Gempol Sewu Kec. Rowosari Kab. Kendal Telp. (0294) 3645668	Luas Tanah: 1.300 m ² Luas Bangunan: 792 m ²
16	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Karimunjawa Kab. Jepara	Tanjung Benteng, Desa/Pulau Karimunjawa, Kec.Karimunjawa Kab. Jepara	Luas Tanah: 10.790 m ² Luas Bangunan: 1.395 m ²
17	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Larangan	Desa Mujungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal	Luas tanah: 1.790 m ² Luas bangunan: 200 m ²
18	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A Karanganyar Tugu Semarang	Desa Karanganyar Kec.Tugu Kota Semarang	Luas tanah: 43.036 m ² Luas bangunan: 462 m ² Luas Tambak: ±35.000 m ²
19	Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya Kab. Tegal	Jl Beringin Raya Km.10 Maribaya Kec. Kramat Kab. Tegal Telp. (0283) 3335709	Luas tanah: 91.940 m ² Luas bangunan: 540 m ² Luas Tambak: ±35.000 m ²
20	Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Kab. Rembang	Ds.Jatisari Kec.Sluke Kab.Rembang	Luas tanah: 5.751 m ² Luas bangunan: 384 m ²

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
			Luas Tambak/ Hatchery: 2.800 m ²
21	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa, Kab.Jepara	Pulau Karimunjawa Kec.Karimunjawa Kab.Jepara	Luas tanah : 11.236 m ² Luas bangunan: 240 m ²
22	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A Semarang	Jl. Empu Tantular 2, Bandarharjo, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah	Luas tanah : 2.320 m ² Luas bangunan: 924 m ²
23	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Ambarawa Kab. Semarang	Ds.Pojok Sari, Kec. Ambarawa, Kabupaten Semarang	Luas tanah: 9.510 m ² , Luas bangunan: 965 m ²
24	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Randudongkal di Kab. Pemalang	Desa Banjaranyar, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	Luas Tanah: 21.110 m ² Luas Bangunan: 150 m ² Luas kolam: ±10.000 m ²
25	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Singosari di Kab. Banyumas	Desa Singosari, Kec. Karangwelas, Kab. Banyumas	Luas Tanah: 20.000 m ² Luas Bangunan: 2.000 m ² Luas kolam: ±10.000 m ²
26	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Muntinan Kab. Magelang	Jl. Kerkop No.1 Muntinan Kabupaten Magelang Telp. (0293) 587022	Luas Kolam keseluruhan: ±15.000 m ² ; Luas Bangunan: 1.638 m ²
27	Loka Ngrajek di Kab. Magelang	Jl Mayor Kusen (Jl Raya Borobudur) Km 4, Desa Ngrajek, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang Telp. (0293) 788306	Luas Kolam : ±35.000 m ² , Luas Bangunan: ±1.085 m ²

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
28	Loka Janti di Kab. Klaten	Desa Janti Kec. Polanharjo, Kab. Klaten. Telp./Fax. (0272) 552 947	Luas kolam ± 15.000 m ² , Luas bangunan dan ruang terbuka: 2.500 m ² , saluran: 21 m ²
29	Loka Tambaksogra di Kab. Banyumas	Desa Tambaksogra, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas	Luas Tanah: 20.000 m ² Luas Bangunan: 1.500 m ² Luas kolam: ± 10.000 m ²
30	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A Semarang	Jl. Siliwangi no. 636 Semarang. Telp.(024) 7605311, 7623231. Fax. (024) 7605311	Luas Tanah: 2.320 m ² Luas Bangunan: 540 m ²
31	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Pekalongan	Jl. Pantaisari II Panjang Wetan Pekalongan Telp. (0285) 421675	Luas Tanah: 2.000 m ² Luas Bangunan: 417,24 m ²
32	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Cilacap	Jalan Dokter Rajiman No.65, Sabukjanur, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53231	Luas Tanah: 1.150 m ² Luas Bangunan: 530 m ²

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah berupa sarana informasi portal berupa *website* dengan alamat akses <http://dkp.jatengprov.go.id>, Email: dkp@jatengprov.go.id, facebook: dkpjateng; Twitter @dkpjateng; Instagram @dkpjateng; Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

6.2.3. Profil UPT Dinas Kelautan Dan Perikanan

Berikut ini adalah gambaran profil Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) yang berada dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

1. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A Semarang

UPT BPMHP Kelas A merupakan perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 yang sebelumnya adalah BP2MHP milik Dinas Kelautan Dan Perikanan Jawa Tengah. BPMHP Semarang memiliki 2 (dua) Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan yaitu: Pekalongan dan Cilacap dan telah terakreditasi. BPMHP berdiri sebagai unit pelaksana teknis daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah No.Hukum.G.102/1973 pada tanggal 19 Mei 1973 dengan nama awal yaitu Lembaga Teknologi Perikanan. Kemudian pada tanggal 15 Juni 1977 dibentuk Unit Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) yang terletak di Semarang, Pekalongan dan Cilacap. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 38 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008, diterbitkan peraturan baru yang merubah nama unit laboratorium tersebut menjadi Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP). Pada tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah diubah menjadi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP). Peraturan tersebut adalah Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Jenis layanan di BPMHP, antara lain;

1. Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
2. Rekomendasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pengolahan.
3. Pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan secara laboratoris.

a) BPMHP Semarang

Jenis Kemampuan Pengujian yang ada di BPMHP Semarang, antara lain;

(1) Mikrobiologi:

ALT (Angka Lempeng Total), *Escherichi coli*, *Salmonella*, *Vibrio cholerae*, *Staphylococcus aureus*.

(2) Kimia dan Fisika:

Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Garam, Kadar TVB dan TMA, *Chloramphenicol*, Formalin, Logam Berat (Hg, Pb, Cd), dan *Tetracycline*.

(3) Organoleptik:

Uji Kesegaran dan Uji *Filth*.

Wilayah kerja BPMHP Semarang meliputi seluruh Jawa Tengah

b) LPMHP Pekalongan

Jenis kemampuan pengujian di LPMHP Pekalongan, antara lain;

(1) Mikrobiologi :

Angka Lempeng Total, *Coliform*, *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Vibrio Cholerae*, *Staphylococcus aureus*.

(2) Kimia dan Fisika :

Suhu Pusat, Bobot Tuntas.

(3) Organoleptik :

Uji Kesegaran dan Uji Filth.

Wilayah kerja LPMHP Pekalongan meliputi Seluruh Jawa Tengah.

c) LPMHP Cilacap

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Laboratorium Pengujian Hasil Perikanan (LPMHP) Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Peralatan untuk pengujian organoleptik :

- 1) Uji Organoleptik
- 2) Uji Sensori
- 3) Uji Filth
- 4) Bobot Tuntas
- 5) Suhu Pusat

2. Peralatan untuk pengujian mikrobiologi, dengan parameter uji :

- 1) Total Plate Count (TPC)/ALT
- 2) E.coli
- 3) Sallmonella
- 4) Vibrio (cholerae dan parahaemolythycus)
- 5) Staphylococcus aerus
- 6) Coliform

3. Peralatan untuk pengujian kimia

- 1) Histamin
- 2) TVB-N
- 3) Formalin
- 4) Antibiotik

Wilayah kerja LPMHP Cilacap meliputi Seluruh Jawa Tengah.

2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A

Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

UPT PPP Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 6 (Enam) unit yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan. Berikut ini adalah gambaran umum PPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah :

1) PPP Tegalsari Kota Tegal

PPP Tegalsari secara geografis terletak pada koordinat 06°51'-06°52' LS dan 109°09'-109°10' BT di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tegalsari antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Breakwater, Revetment, training Jetty, Dermaga bongkar, Dermaga tambat labuh, Alur masuk pelabuhan, Kolam labuh, Kolam perbekalan, Jalan Penghubung).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Fasilitas Pendaratan Ikan (Bangunan TPI dan Tempat Pengepakan), Fasilitas Navigasi (Pelayaran dan Komunikasi, Rambu Suar, Suar Penuntun, Telepon), Fasilitas Suplai Air dan BBM (Reservoir, Sumur Artesis, Jaringan Air Bersih, SPBN (Dikelola KUD “Karya Mina”), Catu Daya Listrik, Gardu Induk Listrik dan Travo, Jalan dan Saluran, Gorong-gorong), Pabrik Es (Kap.8 ton/hari), Chilling Room/Gold Storage (Kap.30 ton), Drainase).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Kantor Administrasi (Kantor PPP Tegalsari, Kantor Syahbandar, dan Poskamladu), Bangunan Serbaguna dan lainnya (Balai Pelatihan Nelayan (SUPM), Mess Operator, Toilet Umum, Kios Pedagang (*Cofish*), Kios Pedagang Swadana, Kios Pedagang (APBD Jateng), Tempat Pengepakan Ikan (*Cofish*), Tempat Pengepakan Ikan (APBD Jateng), Tempat Pengepakan Ikan (Swadana), Gerbang Pelabuhan, Gedung Pabrik Tepung Ikan, Tempat Parkir, Ruko Swadana, Unit Pengolah Limbah (UPL), Tempat Fillet Ikan (Swadana), Pos Portal, Tempat Perbaikan Jaring, Kontainer Sampah, Excavator, Ponton / Tongkang)

2) PPP Klidang Lor Kabupaten Batang

PPP Klidang Lor secara geografis terletak pada koordinat 6°53'11"LS-109°44'55"BT di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Klidang Lor antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: *Break water*, Alur Perairan, Dermaga (Tiang tambat labuh, penerangan, penangkis gelombang/talud)).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Kantor PPP, Kantor Syahbandar, TPI, Lantai Lelang, Instalasi listrik, Sound System, SPDN, Instalasi air bersih, Menara suar).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Kamar mandi/WC, Kios, Areal pengepakan ikan, Kereta dorong, Kolam labuh, Koperasi, Klinik Kesehatan, Pompa air).

3) PPP Morodemak Kabupaten Demak

PPP Morodemak secara geografis terletak pada koordinat 110°32'40"BT dan 6°49'30"LS di Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Morodemak antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur Pelayaran, Dermaga Bongkar, Dermaga fender, Dermaga perbekalan, Breakwater barat, Breakwater timur, Talud sheet pile, Talud beton, Kapal perikanan, Groin, dan Jalan Kompleks)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung TPI, Kantor TPI, Air bersih, Pos satpolair, Kantor ppp, Tempat perbaikan jaring)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Kios, Mushola, MCK, Gapura pintu masuk, Jalan masuk (tanah), Jalan kawasan (tanah), Pagar keliling, Mushola, MCK, Gapura pintu masuk, Jalan masuk (tanah), Jalan kawasan (tanah), Pagar keliling).

4) PPP Bajomulyo Kabupaten Pati

PPP Bajomulyo secara geografis terletak pada koordinat 111°8'30"BT dan 6°42'30" di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Bajomulyo merupakan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Pati antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga/Turap, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung lelang, Reservoir, Tower, Listrik PLN, Genset, SPBB, SPDN, Sound Sistem).
- Fasilitas Penunjang, meliputi:
 - ✓ Unit I (Gedung Pertemuan, MCK umum, Gudang basket, Pos Jaga, Eks kantor UPBI, Cold storage, Musholla, Ruang genset, Area parkir, Pagar keliling)
 - ✓ Unit II (Gedung lelang, Pasar bangsal, Pengepakan ikan, Listrik PLN, Gedung Basket, MCK, Areal parkir depan tempat lelang, Lampu penerangan dermaga, Gedung pos jaga dan doorlup, Drainase induk, Kios perdagangan umum, Kantor Airud, SSB Pos Jaga, Gapura dan Pagar, Pagar Bangunan Lelang, Kantor pengawasan).

5) PPP Tasik Agung Kabupaten Rembang

PPP Tasik Agung secara geografis terletak pada 111°000'-111°030' BT dan 6°30'-7°00' LS di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tasik Agung antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga bongkar, Dermaga muat, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving, Drainase, Talud/Turap)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: TPI (lantai lelang), Tempat Pengepakan, Kantor ADM, Bengkel, SPDN 30.000 liter, Tangki air, dan instalasi, Pabrik Es (CBIP), Timbangan, Basket, Kereta Pengangkut Ikan, Tempat perbaikan Jaring, Tempat Jemuran ikan, Listrik, Kantor Syahbandar, Kantor SSB, Telepon, Sound System, Waserda, Pagar keliling)

- Fasilitas Penunjang (meliputi: Tempat Parkir, MCK (6x3m), Kantor Perhubungan, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Polairud, Kantor HNSI, Kantor KUD Mina, Mushola).

6) PPP Logending Kabupaten Kebumen

PPP Logending secara geografis terletak pada 111°000'-111°030' BT dan 6°30'-7°00' LS di Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Logending antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga bongkar, Dermaga muat, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/paving, Drainase, Talud/Turap)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: TPI (lantai lelang), Tempat Pengepakan, Kantor ADM, Bengkel, SPDN, Tangki air, dan instalasi, Pabrik Es (CBIP), Timbangan, Basket, Kereta Pengangkut Ikan, Tempat perbaikan Jaring, Tempat Jemuran ikan, Listrik, Kantor Syahbandar, Kantor SSB, Telepon, Sound System, Waserda, Pagar keliling)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Tempat Parkir, MCK, Kantor Perhubungan, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Polairud, Kantor HNSI, Kantor KUD Mina, Mushola).

PPP Logending mempunyai 2 (dua) sentra pendaratan ikan yaitu :

a. Sentra Pendaratan Ikan Pasir Kabupaten Kebumen

Sentra Pendaratan Ikan Pasir terletak di Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Adapun fasilitas yang di SPI Pasir antara lain: Rumah mesin, Tempat Parkir, Balai Pertemuan, dan Kantor SAR.

b. Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat Kabupaten Cilacap

Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat terletak di Jl. Veteran No. 2 Kabupaten Cilacap. SPI Sentolokawat memiliki fasilitas berupa Tempat Pendaratan Ikan, SPDN (Solar Package Dealer Nelayan), dan Tempat Penjemuran Ikan

3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B

Dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;

- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

UPT PPP Kelas B Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 5 (lima) unit yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan. Berikut ini adalah gambaran umum PPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah :

1) PPP Asemdayong Kabupaten Pemalang

PPP Asemdayong secara geografis terletak pada koordinat 8°53'30"-7°20'11" LS dan 109°17'30"-109°40'30" BT di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Asemdayong antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur, Dermaga bongkar muat, Saluran Drainase dan Turap/Revetment).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Tanah, Gedung/Kantor TPI, Lantai TPI, Menara Air, SPDN, CBIP, Kios, Instalasi Listrik, Tempat Pengolahan, Tempat Penjemuran ikan).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai luas, Kantor Satker Pelabuhan luas, Kantor Pos Pengawasan Lanal TNI luas, Pondok Boro Nelayan, Mushola, MCK (kondisi sedang), Kantor Kesehatan Pelabuhan, Warung makan dan kios, Pertokoan, dan Tempat parkir motor).

2) PPP Wonokerto Kabupaten Pekalongan

PPP Wonokerto secara geografis terletak pada koordinat 6°54'16" LS dan 109°42' BT di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Wonokerto antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur, Dermaga bongkar muat, Talud/Turap, Lahan PPI, Jalan Lingkungan, Menara Suar, Kolam Pelabuhan dan Breakwater).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Tanah, Gedung/Kantor TPI, Lantai TPI, SPDN, Instalasi Listrik, Instalasi Air Bersih, dan Menara Suar).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal Parkir, Tempat Penjemuran Ikan, Tempat Penjemuran Alat Tangkap, Kamar Mandi/WC, Kios/Los Pertokoan, Pondok Boro, dan Mushola).

3) PPP Tawang Kabupaten Kendal

PPP Tawang secara geografis terletak pada koordinat 6°55'0,3"LS dan 110°02'49,7"BT di Desa Gempolsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tawang antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Break water, Alur Perairan, Dermaga (Tiang tambat labuh, penerangan, penangkis gelombang/talud)).
- Fasilitas Fungsional (meliputi : TPI/lantai lelang, Instalasi listrik, Air bersih (artetis dan PDAM), Kantor, SPDN, Pabrik es curah mini, (*Containerized Block Ice Plant*, Genset, Sound system, Menara suar, Rambu pengaman di muara))
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parker, Kantor Kamladu, Kios ikan, Kamar mandi/WC, Mushola, Pos Jaga).

4) PPP Karimunjawa Kabupaten Jepara

PPP Karimunjawa secara geografis terletak pada koordinat 5°51'50"LS dan 110°26'08" BT di Tanjung Benteng Desa/Pulau Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Karimunjawa antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga/Turap, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung Kantor, TPI, Gedung Pabrik Es, Bengkel, Resevoir Air Tawar, Genset, Radio SSB)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Administrator, Mess Operator 3 kopel)/ Renovasi, Mess Operator).

5) PPP Larangan Kabupaten Tegal

PPP Larangan secara geografis terletak pada koordinat 6°51'41.530"LS dan 109°11'33.572" BT di Desa Munjung Agung Kec.Kramat, Kab. Tegal. Sebagai salah satu UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha.

4. Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A

Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan (BLPKIL) Kelas A Semarang terletak di Jl. Empu Tantular 2 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. BLPKIL Kelas A Semarang telah memiliki Sertifikat Akreditasi KAN dengan No : LP-1120-IDN yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2017 sebagai Laboratorium yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji dengan menerapkan

secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) sebagai persyaratan umum untuk kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi.

Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan (BLPKIL) Kelas A Semarang membawahi 4 (empat) Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) dan 3 (tiga) Loka di Jawa Tengah, yaitu LPKIL Ambarawa di Kabupaten Semarang, LPKIL Randudongkal di Kabupaten Pemalang, LPKIL Singosari di Kabupaten Banyumas, LPKIL Muntilan di Kabupaten Magelang, Loka Ngrajek di Kabupaten Magelang, Loka Janti di Kabupaten Klaten, dan Loka Tambaksogra di Kabupaten Banyumas. Berikut gambaran 4 (empat) LPKIL dan 3 (tiga) Loka BLPKIL, meliputi:

a. Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Ambarawa Kabupaten Semarang

LPKIL Ambarawa terletak di Desa Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Ambarawa. Dibangun di atas lahan seluas 1,6 hektar dengan luas tanah 9.510 m², luas bangunan 965 m² dan luas kolam 6.000 m². Selain penyediaan benih ikan bermutu tinggi dengan tahan penyakit, LPKIL Ambarawa juga menyediakan pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Ambarawa juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Ambarawa merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan Karper dan Lele dari Loka Ngrajek Kabupaten Magelang selain mengembangkan benih dan induk ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu LPKIL Ambarawa juga sebagai tempat pengembangan Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) meliputi pengembangan alat dan formulasi pakan mandiri berbasis sumberdaya lokal.

b. Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Randudongkal Kabupaten Pemalang.

LPKIL Randudongkal terletak di Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan memiliki luas tanah ± 1 Ha, luas bangunan 160 m², dan luas kolam 3.308 m² dengan jumlah kolam 17 petak. Pada tahun 2014 LPKIL Randudongkal bernama BBI Randudongkal yang merupakan wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntilan Magelang).

Penyediaan benih ikan bermutu tinggi dan tahan penyakit serta pelayanan kesehatan ikan menjadi orientasi dari LPKIL Randudongkal. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Randudongkal juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Randudongkal juga merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan gurame dari Loka Tambaksogra Kabupaten Banyumas selain mengembangkan benih dan induk ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

c. Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Singosari Kabupaten Banyumas.

LPKIL Singosari terletak di Desa Singosari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Memiliki luas tanah 2 Ha dengan luas bangunan 1.311 m². Luas kolam 6.131 m² dengan jumlah kolam 48 petak.

LPKIL Singosari pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 26 Februari bernama Loka PBIAT Singosari yang merupakan wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntlan Magelang). Kemudian sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berubah nama menjadi Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Singosari. Dalam orientasi kerjanya LPKIL Singosari melaksanakan penyediaan benih bermutu tinggi dan tahan penyakit serta pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Singosari juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Singosari juga merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan gurame dari Loka Tambaksogra Kabupaten Banyumas selain mengembangkan benih dan induk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

d. Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Muntilan Kabupaten Magelang.

LPKIL Muntilan terletak di Jl.Kerkop No.1 Muntilan Kabupaten Magelang.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan produksi perikanan di Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur pada Tahun 1953 maka dibentuklah Balai Pendidikan Perikanan (BPP) Muntilan, Magelang. Dengan berlakunya Perda No. 1 Tahun 2002 maka BPP Muntilan berubah menjadi Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan (BPBI), yang selanjutnya melalui Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2008 berubah menjadi Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT) yang berkedudukan di Muntilan. Tahun 2017, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 75 Tahun 2016, BPBIAT berubah menjadi Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT). Kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 tahun 2018 berubah menjadi Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Muntilan.

Terletak di ketinggian 350 m di atas permukaan air laut yang mempunyai topografi landai sampai datar dengan suhu udara berkisar antara 25°C -33°C. Mempunyai luas lahan 2,93 ha dengan sumber air berasal dari saluran irigasi Sungai Lamat. Debit air musim hujan 20-30 liter per detik, sedangkan pada musim kemarau 5-10 liter per detik.

Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Muntilan dalam orientasi kerjanya melaksanakan penyediaan benih bermutu tinggi dan tahan penyakit serta pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Muntilan juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Muntilan juga merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan lele dan karper dari Loka Ngrajek Kabupaten Magelang selain mengembangkan benih dan induk ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

e. Loka Ngrajek Kabupaten Magelang

Berawal dari nama Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Ngrajek, yang berlokasi di Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan ketinggian 340 meter di atas permukaan air laut. Dibangun pada tahun 1962 dan arealnya diperluas pada tahun 1964 menjadi 5,3 hektar. Sumber air berasal dari 2 (dua) mata air yaitu Mudal dan Combrang, dengan debit 54 liter/dt pada daerah pangkal saluran dan 5 liter/dt pada daerah ujung saluran. Orientasi awal yang tetap menjadi andalan Loka Ngrajek hingga saat ini adalah penyediaan benih ikan air tawar unggul dan tahan penyakit seperti: Tawes, Karper Merah Cangkringan dan Majalaya, Lele (Dumbo, Sangkuriang, dan Phytton), Nila (Hitam dan Merah), Grasscarp, Patin, dan Nilem dan calon induk ikan air serta penyediaan induk unggul ikan lele yang dapat menghasilkan benih unggul dan tahan penyakit. Selain melaksanakan pelayanan penyediaan benih dan induk unggul Loka Ngrajek juga menyediakan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Ngrajek juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock karper dan lele; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

f. Loka Janti Kabupaten Klaten

Loka Janti terletak di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Dibangun pada tahun 1979 di atas lahan seluas 2,89 hektar. Luas kolam 1,7 hektar (60%), bangunan dan ruang terbuka 0,98 hektar (30%) dan saluran 0,21 hektar (10%), dengan ketinggian tempat 203 meter di atas permukaan air laut. Sumber air berasal dari Umbul Nilo dan Umbul Wunut melalui saluran irigasi teknis yang mengalir sepanjang tahun dengan debit berkisar 25-40 l/dt dan kualitas yang cukup baik sehingga ideal bagi kegiatan perbenihan ikan.

Loka Janti memiliki tugas sebagai Pusat Pengembangan Induk Ikan Nila Regional (PPIINR) yang ditetapkan berdasarkan SK. Dirjen Perikanan Budidaya NO. 6378/DPB –1/-PB. 110. D1/12/03 sebagai perpanjangan tangan terhadap Pusat Pengembangan Ikan Nila Nasional (PPIIN) yang berpusat di Sukabumi. Dengan tugas utama memperbaiki mutu genetik untuk induk dan benih ikan nila.

Selain melaksanakan pelayanan penyediaan induk unggul ikan nila, Loka Janti juga menyediakan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan

pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Janti juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock Nila; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

g. Loka Tambaksogra Kabupaten Banyumas

Pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 26 Februari bernama Loka PBIAT Tambaksogra yang menjadi wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntiran Magelang). Kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 tahun 2018 berubah menjadi Loka Tambaksogra dibawah Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Semarang.

Loka Tambaksogra terletak di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Memiliki luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan 783 m². Luas kolam 10.680 m² dengan jumlah kolam 26 petak. Menyediakan pelayanan calon induk unggul gurami dan benih ikan air tawar serta pengujian kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Tambaksogra juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock Gurame; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

5. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A Karanganyar Tugu

Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A Karanganyar terletak di Desa Tugu Kecamatan Tugu, Kota Semarang. BIAP Karanganyar memiliki luas tambak 3,4 Ha dan luas bangunan 5.000 m². Fasilitas di BIAP Karanganyar antara lain: Luas lahan produktif berupa 4 petak tambak untuk budidaya; 2 petak kecil tambak untuk pendederan (penampungan air), dengan luas total lahan ± 4 Ha. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut membawahi 3 (tiga) Loka Budidaya Air

Payau, meliputi: Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya Tegal, Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Rembang dan Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa Jepara.

a. Loka BIAP Maribaya Tegal

Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya berada di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Luas tanah LBIAP Maribaya adalah 40.000 m² dengan luas bangunan sebesar 350 m², serta luasan tambak mencapai 26.390 m².

b. Loka PIAP Sluke Rembang

Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke berada di Desa Jatisari Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Luas tanah PIAP Sluke adalah 5.751 m² dengan luas bangunan sebesar 384 m², sarana yang dimiliki antara lain 11 bak *indoor* dan 16 bak *outdoor*.

Fasilitas di Loka BIAP Sluke antara lain:

- 1 (satu) gedung kantor
- 1 (satu) labotarorium pakan alami
- 1 (satu) bak induk udang kapasitas 10 ton
- 2 (dua) bak induk bandeng kapasitas 200 ton
- 1 (satu) bak induk indoor kapasitas 40 ton
- 1 (satu) bak kultur massal plankton outdoor
- 10 (sepuluh) bak beton outdoor kapasitas 8 ton
- 2 (dua) reservoir air laut 100 ton

c. Loka PBIAL Karimunjawa Jepara

Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa Jepara terletak di Pulau Karimunjawa Kabupaten Jepara. Loka PBIAL Karimunjawa memiliki luas lahan sebesar 10.000 m² dan Luas Bangunan sebesar 150 m². Fasilitas di PBIAL Karimunjawa antara lain;

- Hatchery ukuran 5 x 2 m sebanyak 5 bak
- Bak ukuran 2,5 x 2,4 m sebanyak 12 unit
- Bak bulat volume 30 ton sebanyak 1 unit
- Bak bulat volume 15 ton sebanyak 2 unit
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 35 petak produksi
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 6 petak pembenihan
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 10 petak calon induk
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 9 petak konsumsi

6.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Terdapat 6 (enam) Sasaran Strategis meliputi:

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan, meliputi: Produksi Perikanan Tangkap, Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan, Produksi Perikanan Budidaya, Persentase Peningkatan Produksi Induk Dan Benih, Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan, Volume Ekspor Hasil Perikanan, Persentase Peningkatan Produksi Garam, Persentase Peningkatan Pemberdayaan Wanita dan Taruna Pesisir;
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, meliputi: Jumlah Stakeholder yang Memahami Peraturan Tata Ruang Laut, Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan, Peningkatan Luas Kawasan Mangrove, Perlindungan Terumbu Karang, Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, serta Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD

Selain berdasarkan Sasaran Strategis, kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengacu pada indikator kinerja tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Kelautan dan Perikanan.

Formulasi pengukuran kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target kuantitatif sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis tersebut. *Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indi kator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir																					
1	Rata-rata pendapatan pemberdayaan wanita pesisir (Rp/Kap/Th)	-	-	-	-	2.961.073,87	3.076.555,75	3.076.555,75	6.800.000	7.600.000	2.742.951,61	5.528.000	5.704.000	6.008.400	7.188.740	8.595.784,80	-	193,97	192,63	195,30	105,72	113,10
2	Rata-rata Pendapatan taruna pesisir (Rp/Kap/Th)	-	-	-	-	4.475.418,54	4.657.120,53	4.657.120,53	9.000.000	10.000.000	4.133.005,79	4.800.000	5.085.000	5.343.750	9.075.075	10.632.242,95	-	111,61	113,62	114,74	100,83	106,32
3	Produksi Garam (ton)	-	-	-	-	-	-	-	694.575	729.304	-	633.840,13	841.543,56	26.150,37	307.249,18	762.381,61	-	-	-	-	44,24	104,54
II	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan																					
4	Jumlah kelompok masyarakat Swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang aktif (kelompok)	-	-	-	20	20	20	20	20	20	10	20	20	20	35	65	50	100	100	100	175	325
III	Program Pengembangan Perikanan Tangkap																					

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	2,0%/th	-	-	205.796	306.866,21	317.424,48	317.424,48	283.714,75	293.474,54	243.694,5	270.158,30	359.468,00	327.624,00	437.936,36	446,277,16	118,42	91,07	117,14	103,21	154,358	152,07
6	Rata-rata pendapatan nelayan (Rp/Kap/Th)	7,60%/th	-	-	6.004.780	12.546.157,65	13.608.817,20	13.608.817,20	11.718.192,54	12.710.723,45	10.765.779,48	14.200.605,94	32.657.488,12	41.319.676,00	60.010.127,34	61.150.319,76	179,29	122,77	260,30	303,62	512,110	481,09
IV	Program Pengembangan Perikanan Budidaya																					
7	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	35,25%/th	-	-	177.333,8	309.949,63	333.474,81	333.474,81	463.123,9	509.436,29	315.458,67	501.811,74	421.021,73	448.897,00	485.689,98	510.324,49	177,89	174,19	135,84	134,61	104,87	100,17
8	Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (Rp/Kap/Th)	23,85%/th	-	-	2.838.740	17.298.864,23	18.314.307,57	18.314.307,57	32.587.070,28	35.845.777,31	23.160.988,43	32.191.966,26	35.322.004,47	39.790.969,00	42.814.779,35	44.955.518,32	815,89	197,02	204,19	217,27	131,38	125,41

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
V	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan																					
9	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	5,86%/th	-	-	17,82	19,59	20,55	20,55	21,55	22,59	18,19	20,92	23,64	26,71	29,19	30,65*	102,08	111,93	120,67	129,98	128,91	135,68*
10	Volume EksporProduk Perikanan (Ton)	5,10%/th	-	-	22.818,59	25.770,99	26.466,80	26.466,80	27.181,41	27.915,31	22.898,18	35.500,94	31.376,35	43.873,16	42.242,88	41.815,23	100,35	141,47	121,75	165,77	155,41	149,79
VI	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan																					
11	Luas penanaman mangrove (ha)	-	-	-	263.500 btg	8,13	8,25	8,25	8,38	8,5	8,08	7,61	15,13	8,26	14,20	10,20	122,66	101,47	186,10	100,12	169,45	120
12	Luas terumbu karang buatan (ha)	-	-	-	75 unit	5,13	5,58	5,58	6,03	6,48	17,28	5,40	5,40	7,99	7,47	6,48	256	115,38	105,26	143,19	123,88	100

Keterangan : *) Angka Sementara, Perhitungan AKI menggunakan angka perhitungan SUSENAS BPS.

6.4. Kinerja Program

6.4.1. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu andalan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan gizi bagi masyarakat di Jawa Tengah. Sektor ini mendukung prioritas pembangunan Jawa Tengah (3) penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana. Dalam rangka melindungi kepentingan nelayan yang merupakan salah satu program unggulan Gubernur Jawa tengah telah dilakukan berbagai upaya antara lain pemberian bantuan sarana prasarana perikanan tangkap (bubu, rumah ikan, global positioning system, jaring dan mesin) guna mengurangi penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, serta bantuan premi asuransi sebesar Rp1,706 Miliar bagi sebanyak 10.000 nelayan kecil dan tradisional yang pernah mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan namun tidak melanjutkan secara mandiri.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui 5 program yaitu Pengembangan Perikanan Tangkap, Usaha dan Pengembangan Komoditas, Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Pengawasan dan Pengelolaan SDKP, dan Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan, yang terdistribusi kedalam 27 indikator kinerja program. Perincian ketercapaian dari 27 indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan halaman 1-4.

Dari lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan halaman 1-4 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pengembangan Perikanan Tangkap memiliki 12 indikator. Semua indikator tingkat ketercapaiannya adalah sangat tinggi; 2) Program Usaha dan Pengembangan Komoditas memiliki 3 indikator. Semua indikator tingkat ketercapaiannya adalah sangat tinggi; 3) Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut memiliki 6 indikator. Tingkat ketercapaiannya adalah sebanyak 5 indikator (83,33%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi dan tinggi, serta 1 indikator (16,67%) memiliki tingkat ketercapaian sangat rendah; 4) Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

memiliki 4 indikator. Semua indikator tingkat ketercapaiannya adalah sangat tinggi; 5) Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki 2 indikator. Semua indikator tingkat ketercapaiannya adalah sangat tinggi.

Secara keseluruhan, dari 27 indikator terdapat 26 indikator (96,30%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi dan tinggi, serta 1 indikator (3,70%) memiliki tingkat ketercapaian sangat rendah. Uraian berkaitan dengan indikator kinerja program dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Pengembangan Perikanan Tangkap	12	12	-	-	-	-
2	Usaha dan Pengembangan Komoditas	3	3	-	-	-	-
3	Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut	6	4	1	-	-	1
4	Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	4	4	-	-	-	-
5	Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	2	2	-	-	-	-
Jumlah		27	25	1	-	-	1

- Keterangan:
- Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:
- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
 - 2) Tinggi : 76 – 90,99%
 - 3) Sedang : 66 – 75,99%
 - 4) Rendah : 51 - 65,99%
 - 5) Sangat rendah : $\leq 50,99\%$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Perikanan Tangkap, memiliki 12 indikator kinerja program (1 indikator di Dinas Induk dan 11 indikator di Pelabuhan Perikanan Pantai), dengan tingkat ketercapaian semua indikator sangat tinggi, antara lain: Persentase ketercapaian

pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo, realisasi 81,82% melebihi dari target 72,73%; Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending dengan realisasi 81,82% sesuai target; Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak dengan realisasi 72,73% sesuai target; Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang, realisasi 81,82% melebihi dari target 54,55%. Tingginya tingkat capaian sebesar 149,99% diantaranya karena adanya penambahan 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang dilaksanakan yaitu docking kapal, logbook kapal perikanan dan rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi; serta produksi perikanan tangkap, realisasi 495.356,22 Ton melebihi dari target 393.150 ton. Tingginya tingkat capaian sebesar 125,99% disebabkan penggunaan teknologi penangkapan ikan, penggunaan freezer/refrigerator sehingga hasil tangkapan tidak banyak yang terbuang, penenggelaman rumah ikan dan menurunnya Illegal Unreported Unregulated (IUU) fishing.

Sebaran capaian indikator kinerja produksi perikanan tangkap di kabupaten/ kota tertinggi di Kabupaten Batang sebesar 122.363 ton (24,70%) dan terendah di Kota Surakarta sebesar 0,64 ton (0,00012%).

Penyelenggaraan program pengembangan perikanan tangkap mempunyai manfaat adanya peningkatan produksi perikanan tangkap melalui pengembangan fungsi pelabuhan sebagai pusat aktifitas perekonomian masyarakat nelayan, pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan ramah lingkungan (jaring dan bubu), coolbox, alat bantu navigasi, serta bantuan premi asuransi bagi nelayan kecil.

Program Usaha dan Pengembangan Komoditas, memiliki 3 indikator kinerja program (1 indikator di Dinas Induk dan 2 indikator di Balai), dengan tingkat ketercapaian semua indikator sangat tinggi, yaitu: indikator persentase penanganan kasus hama penyakit ikan dengan realisasi 100% sesuai target; indikator persentase peningkatan produksi benih terealisasi sebesar 37,1% melebihi target 5% dengan capaian 742%. Tingginya tingkat capaian tersebut disebabkan optimalnya proses pembenihan ikan melalui penyediaan induk di loka-loka serta penerapan teknologi yang didukung sumber daya manusia yang berkompeten; dan indikator produksi perikanan budidaya, realisasi 513.365,27 ton, melebihi target 464.608,41 ton.

Sebaran capaian indikator kinerja produksi perikanan budidaya di kabupaten/ kota tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 73.247,73 ton (14,27%) dan terendah di Kabupaten Surakarta sebanyak 44,001 ton (0,008%).

Penyelenggaraan program usaha dan pengembangan komoditas mempunyai manfaat terkendalinya kasus penyebaran hama dan penyakit ikan melalui upaya penanganan yang intensif, serta peningkatan produksi benih ikan berkualitas.

Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, memiliki 6 indikator kinerja program (3 indikator di Dinas Induk dan 3 indikator di Cabang Dinas), dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi sebanyak 4 indikator, tinggi 1 indikator, dan sangat rendah 1 indikator.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu: indikator persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif dengan realisasi 15% sesuai target; indikator persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir, realisasi 33,33% melebihi target 10%, dengan tingkat capaian 333,3% disebabkan optimalnya dukungan masyarakat dan stakeholder terkait dalam upaya pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir; indikator persentase peningkatan luas kawasan mangrove yang direhabilitasi dari tahun sebelumnya (wilayah selatan), realisasi 5,89%, melebihi target 5%; dan persentase peningkatan luas kawasan mangrove yang direhabilitasi dari tahun sebelumnya (wilayah barat), realisasi 5,61%, melebihi target 5%.

Indikator dengan tingkat ketercapaian tinggi adalah persentase peningkatan produksi garam terealisasi 4,06% dari target 5% dengan tingkat capaian 81,2%. Peningkatan produksi garam dicapai melalui penerapan teknologi geo membran yang dapat mempercepat kristalisasi dan meningkatkan kualitas, penggunaan teknologi tunnel oleh petambak garam di pantai selatan Jawa mendorong petambak untuk tetap produksi meskipun dalam musim penghujan, dan musim kemarau yang lebih panjang.

Sedangkan indikator dengan tingkat ketercapaian sangat rendah adalah persentase peningkatan luas kawasan mangrove yang direhabilitasi dari tahun sebelumnya (wilayah timur), realisasi 1,70% dari target 5%. Hal ini disebabkan dari luasan lahan mangrove yang rusak di Jawa Tengah wilayah timur seluas 1.174 ha, yang memenuhi syarat administrasi untuk ditanam bibit

mangrove yaitu tanah negara dan di atas garis pantai sesuai kewenangan provinsi, baru seluas + 19,96 ha (1,7%).

Sebaran capaian indikator kinerja produksi garam di kabupaten/kota tertinggi di Kabupaten Pati sebanyak 351.736,825 ton (44,34%) dengan luas lahan 2.974,75 ha.

Manfaat penyelenggaraan program pengelolaan ruang laut dan pesisir pada meningkatnya jumlah perempuan dan taruna pesisir yang diberdayakan, serta meningkatnya produksi garam.

Program Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) memiliki 4 indikator kinerja program (1 indikator di Dinas Induk dan 3 indikator di Cabang Dinas), dengan tingkat ketercapaian semua indikator sangat tinggi, yaitu: Persentase jumlah kasus pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang ditindaklanjuti dengan realisasi 1% sesuai target; Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah dengan realisasi 10% sesuai target; Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah dengan realisasi 10% sesuai target; dan Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah, realisasi 10,97% melebihi target 10%.

Manfaat penyelenggaraan program pengawasan pengelolaan SDKP melalui kerjasama dengan POLAIR Polda Jawa Tengah dan Pos Angkatan Laut adalah menurunnya jumlah pelanggaran pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 573 (Pantai Selatan) dan 712 (Pantai Utara) Jawa Tengah, dan meningkatnya keamanan konsumsi pangan hasil olahan SDKP.

Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki 2 indikator kinerja program (1 indikator di Dinas Induk dan 1 indikator di Balai) dengan tingkat ketercapaian semua indikator sangat tinggi, yaitu: Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu, realisasi 122,1% melebihi target 10% tingginya tingkat capaian 22,2% disebabkan meningkatnya kesadaran produsen akan pentingnya legalitas hasil perikanan yang baik; dan Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan, realisasi 8,82% melebihi target 5%. Tingginya tingkat capaian 176,4% disebabkan meningkatnya penjaminan kesehatan dan mutu

ikan serta keamanan pangan melalui penerbitan sertifikat CPIB (Cara Penanganan Ikan Yang Baik) bagi 46 unit supplier/pemasok bahan baku yang ada di wilayah Jawa Tengah.

Penyelenggaraan program penguatan daya saing dan logistik hasil kelautan dan perikanan mempunyai manfaat meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk hasil perikanan dan menjaga kualitas produk perikanan, serta meningkatnya keragaman olahan hasil perikanan sebagai sumber protein hewani.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sejumlah Rp99.016.524.000,00 diampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan rincian: Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.42.604.524.000,00 dan Belanja Langsung sejumlah Rp.56.412.000.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 5 program dengan realisasi fisik sebesar 99,99% dan keuangan 96,03%.

1) Belanja Langsung

Program Pengembangan Perikanan Tangkap, alokasi anggaran sejumlah Rp.20.887.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 99,96% dan keuangan 96,98%. Kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain: Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan keluaran meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat sejumlah 130 unit, dan sebanyak 2.513 unit kapal perikanan terdaftar sebagai kapal perikanan <10 GT; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Bajomulyo Kelas A dengan keluaran meningkatnya kualitas pelayanan melalui penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebanyak 3.209 dokumen, pelayanan perijinan sejumlah 286 unit, serta persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha sebesar 2%; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Karimunjawa Kelas B dengan keluaran meningkatnya kualitas pelayanan melalui penerbitan SPB sebanyak 727 dokumen, pelayanan perijinan sebanyak 29 unit, serta persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha sebesar 26%; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tegalsari Kelas A dengan keluaran meningkatnya kualitas pelayanan melalui penerbitan SPB sebanyak 2.237 dokumen, pelayanan perijinan sebanyak 616 unit, serta persentase

peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha sebesar 14%;

Kegiatan Kepelabuhan dan Kenelayan dengan keluaran antara lain meningkatnya kondusifitas melalui perlindungan bagi 10.000 nelayan, semakin optimalnya pengelolaan pelabuhan perikanan melalui pelaksanaan kesyahbandaran di 11 lokasi PPP, dan penerapan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di 1 lokasi PPP.

Program Usaha dan Pengembangan Komoditas, alokasi anggaran sejumlah Rp11.200.000.000,00 dengan realiasi fisik sebesar 100% dan keuangan 96,05%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Kegiatan Pengembangan Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A dengan keluaran meningkatnya kualitas pelayanan melalui produksi benih bermutu sebanyak 8.101.000 ekor, produksi induk unggul sebanyak 7.254 ekor, dan pemenuhan standar teknis pada 1 unit laboratorium; Kegiatan Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A dengan keluaran meningkatnya ketersediaan ikan melalui produksi benih bermutu sebanyak 13.558.200 ekor, serta produksi ikan konsumsi air payau dan laut sebanyak 12,87 ton; Kegiatan Pengembangan Komoditas dengan keluaran meningkatnya kualitas pembudidayaan ikan melalui sertifikasi CPIB kepada 13 unit pembenihan ikan, sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada 64 unit pembesaran ikan, serta pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya kepada 12 Kelompok Pembudidaya Perikanan (Pokdakan).

Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, alokasi anggaran sejumlah Rp5.050.000.000,00 dengan realiasi fisik sebesar 100% dan keuangan 92,18%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan keluaran meningkatnya penggunaan teknologi di tambak garam seluas 3.262,6 Ha, serta meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan dan taruna pesisir melalui pemberdayaan sebanyak 250 orang; Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut dengan keluaran meningkatnya pemahaman peraturan tata ruang laut bagi sebanyak 250 stakeholder, dan penerbitan 2 dokumen peraturan tindak lanjut Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Program Pengawasan dan pengelolaan SDKP, alokasi anggaran sejumlah Rp13.975.000.000,00 dengan realiasi fisik sebesar 100%

dan keuangan 96,73%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP dengan keluaran meningkatnya koordinasi melalui pelaksanaan 50 kegiatan Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan, meningkatnya pemahaman peraturan perikanan kepada 300 orang, dan meningkatnya kondusivitas melalui penyelesaian 10 kasus konflik dengan pertemuan antisipasi konflik antar nelayan; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A dengan keluaran meningkatnya kualitas ekosistem laut melalui penanaman sebanyak 112.800 batang bibit mangrove, dan semakin optimalnya pelaksanaan pengawasan melalui penemuan 10 pelanggaran; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A dengan keluaran meningkatnya kualitas ekosistem laut melalui penanaman sebanyak 200.000 batang bibit mangrove, serta optimalnya pelaksanaan pengawasan dengan penemuan 45 pelanggaran; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A dengan keluaran meningkatnya kualitas ekosistem laut melalui penanaman 84.500 batang bibit mangrove, serta optimalnya pelaksanaan pengawasan melalui penemuan 8 pelanggaran.

Program Penguatan daya saing dan logistik hasil kelautan dan perikanan, alokasi anggaran sejumlah Rp5.300.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 94,04%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Kegiatan Pengembangan Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk dengan keluaran meningkatnya kualitas SDM perikanan melalui pembinaan kepada 250 orang dan 10 Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), serta meningkatnya pemahaman masyarakat melalui kampanye Gemarikan kepada 5.000 orang; Kegiatan Pengembangan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A dengan keluaran meningkatnya pelayanan melalui penerbitan 186 rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), 5 dokumen Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI, dan 817 sertifikat hasil uji (CAT) mutu produk perikanan.

Adapun realisasi secara rinci sebagaimana Lampiran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan halaman 1-7.

2) Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung yang dikelola DKP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar Rp. 42.604.524.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.107.403.497,00 atau sebesar 96,48%. Anggaran Belanja Tidak Langsung digunakan untuk pembiayaan gaji dan tunjangan serta tunjangan penghasilan.

Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan rekomendasi teknis hibah uang sejumlah Rp.235.000.000,00 lewat anggaran Belanja Tidak Langsung yang dikelola oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Hibah tersebut seluruhnya telah diterimakan kepada sebanyak 10 Pokdakan tersebar di Kabupaten Cilacap, Pekalongan, Klaten, Purworejo, Karanganyar, Sragen dan Purbalingga dengan nominal bervariasi antara Rp15.000.000,00 - Rp50.000.000,00 per masing-masing Pokdakan.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Pemberlakuan regulasi pembatasan penggunaan alat tangkap cantrang berdampak terjadinya konflik nelayan;
- 2) Terjadinya moral hazard nelayan agar terbebas dari pengurusan dokumen perijinan dan pembayaran retribusi dengan cara penurunan Gross Tonase (GT) kapal hingga <10 GT;
- 3) Menurunnya kualitas benih bermutu karena terdampak musim kemarau panjang;
- 4) Menurunnya kualitas produk olahan berbahan baku ikan (dari hasil tangkapan dan budidaya);
- 5) Masih tingginya pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Solusi

- 1) Sosialisasi regulasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan serta pembukaan gerai perijinan untuk memfasilitasi perubahan ijin kapal;
- 2) Perlunya cek ulang fisik kapal yang melakukan proses perijinan;
- 3) Perbenihan ikan dengan menggunakan inovasi/teknologi budidaya dengan penggunaan air yang minimal;
- 4) Pelatihan nilai tambah produk olahan berbahan baku ikan bagi kelompok pengolah dan pemasar;
- 5) Pelaksanaan operasi pengawasan di laut dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berharap laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk pengambilan keputusan di masa depan Provinsi Jawa Tengah.